



e-Modul

# PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas  
2019

e-Modul



# Ancaman terhadap Tantangan Integrasi Nasional

**Penyusun :**

Rahimah  
SMAN 2 Banjarmasin

**Reviewer :**

Drs. Samsiar, M.Si.

**Validator :**

Drs. Samsiar, M.Si.

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Peta Konsep



**Gambar :**  
Peta Konsep :  
[princessayu4.blogspot.com/2013/11/peta-konsep-transpor-aktif](http://princessayu4.blogspot.com/2013/11/peta-konsep-transpor-aktif)



Daftar Isi

# Glosarium

Infrastruktur politik, merupakan kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif.

Legitimasi, adalah sebuah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan.

Partisipasi politik, adalah kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu.

Sistem politik, adalah tercakup adanya lembaga negara dan hubungan antarnegara; memiliki fungsi integrasi dan adaptasi; dan sebuah mekanisme fungsi dan peranan dalam struktur politik.

Suprastruktur politik, merupakan organisasi atau lembaga resmi negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi yang berlaku dalam negara tersebut.



[Daftar Isi](#)

# Daftar Isi

## **Daftar Isi**

## **Peta Konsep**

## **Glosarium**

## **Pendahuluan**

- Identitas Modul
- Kompetensi Dasar
- Deskripsi
- Petunjuk Penggunaan Modul
- Materi Pembelajaran

## **Kegiatan Pembelajaran I**

1. Tujuan
2. Uraian Materi
3. Rangkuman
4. Latihan Essay
5. Latihan Pilihan Ganda
6. Penilaian Diri

## **Kegiatan Pembelajaran II**

1. Tujuan
2. Uraian Materi
3. Rangkuman
4. Latihan Essay
5. Latihan Pilihan Ganda
6. Penilaian Diri

## **Kegiatan Pembelajaran III**

1. Tujuan
2. Uraian Materi

3. Rangkuman
4. Latihan Essay
5. Latihan Pilihan Ganda
6. Penilaian Diri

### **Kegiatan Pembelajaran IV**

1. Tujuan
2. Uraian Materi
3. Rangkuman
4. Latihan Essay
5. Latihan Pilihan Ganda
6. Penilaian Diri

### **Evaluasi**

### **Daftar Pustaka**

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Daftar Pustaka

Kardiman, Yuyus, dkk. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Erlangga.

Nuryadi, dkk. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Kemdikbud.

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Daftar Isi

# Pendahuluan

## IDENTITAS MODUL

---

**Nama Mata Pelajaran** : Pendidikan Pancasila dan Kewargangeraan

**Kelas / Semester / Alokasi Waktu** : X /Ganjil (1) / 2 JP

**Judul eModul** : Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945

## KOMPETENSI DASAR

---

3.3 Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.3.1 Siswa dapat mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia.

3.3.2 Siswa dapat mengidentifikasi lembaga-lembaga negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945.

3.3.3 Siswa dapat menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik..



3.3.4 Siswa dapat menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia.

4.3 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.3.1 Menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.3.2 Memverifikasi kesimpulan data dan informasi tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara.

4.3.3 Mempresentasikan hasil verifikasi data tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara

4.3.4 Mengomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **DESKRIPSI**

---

e-Modul ini di beri judul; "Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945", diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kalian tentang kontribusi lembaga negara tersebut

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian akan bermanfaat bagi kalian dalam mencermati dinamika kehidupan yang amat cepat pada era teknologi saat ini.

## **PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL**

---

Bacalah isi modul ini secara keseluruhan dengan seksama. Buatlah catatan pada bagian-bagian yang kalian anggap perlu mendapat perhatian atau penjelasan dari sumber lain, setelah kalian selesai membaca modul ini cobalah untuk membuat rangkuman dengan kata-kata kalian sendiri yang bisa dipahami dan memuat pokok-pokok isi modul/kegiatan belajar yang baru saja kalian baca..

"Pendidikan setingkat dengan olahraga dimana memungkinkan setiap orang untuk bersaing" - **Joyce Meyer**

"Sekolah maupun kuliah tidak mengajarkan apa yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Mereka mengajarkan kita cara berpikir logis, analitis dan praktis." - **Azis White**.

## **MATERI PEMBELAJARAN**

---

Nah, selanjutnya perhatikanlah pokok materi berikut ini :

- Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia.
- Lembaga-Lembaga Negara RI Menurut UUD NRI Tahun 1945.
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Politik Indonesia.



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Kegiatan Pembelajaran I

## 1. TUJUAN

Silakan dibaca materi pada kegiatan pembelajaran 1 (satu) dan setelah itu kalian diharapkan dapat mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia:



### Gambar :

Kelompok Kepentingan (sumber:  
<http://media.blogspot.com>)

Silahkan dicermati gambar di atas, apa yang kalian pikirkan dari gambar tersebut.

1. Tuliskan yang kalian pikirkan dibuku catatannya.
2. Tuliskan pertanyaan dari yang kalian pikirkan sesuai gambar.

" Setitik embun dapat melembabkan daun daunan, sederas hujan dapat membasahi daun beserta dahannya sungguh ilmu yang kamu dapat pada kami bagaikan hujan deras yang tak pernah berhenti membasahi kami. kami tumbuh dan berkembang dan selanjutnya memekari seluruh sekitar kami dan akhirnya membuat mahluk ciptaan Tuhan menjadi bahagia dengan keberadaan kami. Terima kasih telah menjadi hujan deras buat otak dan akhlak kami."

## 2. URAIAN MATERI

---

### 2.1. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia:

Sebelum mempelajari suprastruktur dan infrastruktur politik, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu sistem politik. Berikut ini adalah pengertian sistem politik menurut beberapa ahli:

Sri Sumantri, sistem politik adalah pelebagaan dari hubungan antarmanusia yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik.

Gabriel Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat yang

merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.

David Easton, sistem politik adalah sistem interaksi dalam setiap masyarakat yang didalamnya dibuat alokasi yang mengikat atau bersifat otoritatif.

Dari tiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem politik mencakup adanya lembaga negara dan hubungan antarnegara; memiliki fungsi integrasi dan adaptasi; dan sebuah mekanisme fungsi dan peranan dalam struktur politik.

Bagaimana dengan sistem politik di Indonesia?

Menurut M. Budiana, sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Suprastruktur Politik Indonesia

Suprastruktur politik adalah organisasi atau lembaga resmi negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi yang berlaku dalam negara tersebut. Di Indonesia, suprastruktur bertumpu pada Trias Politica yang terbagi dalam tiga kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

Infrastruktur Politik Indonesia

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Pada dasarnya

organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik.:

#### Partai Politik

Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik.

#### Kelompok Kepentingan (Interest Group)

Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok ini tidak berusaha untuk menempatkan wakilnya ke dalam parlemen, hanya berusaha mempengaruhi satu atau beberapa partai di dalamnya, instansi pemerintah atau menteri.

Kelompok Penekan (Pressure Group) Sekelompok orang yang tergabung dalam lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas melakukan tekanan kepada pemerintah yang berkuasa agar

keinginannya dapat diakomodasi. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka.

Media Komunikasi \

Politik Sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

### **3. RANGKUMAN**

---

Sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Suprastruktur politik adalah organisasi atau lembaga resmi negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi yang berlaku dalam negara tersebut.

Komponen suprastruktur politik adalah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif.

Komponen dari infrastruktur politik adalah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik.



“ Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama ”

 **Daftar Isi**

# Latihan Essay II

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif penyelesaiannya!

01. Jelaskan perbedaan antar menteri koordinator dengan menteri departemen!

Alternatif penyelesaian

02. Apa yang dimaksud dengan hak interpolasi.

Alternatif penyelesaian

03. DPD adalah lembaga negara setelah reformasi, jelaskan fungsinya.

Alternatif penyelesaian



Daftar Isi

## Latihan Pilihan Ganda II

1. Di dalam UUD NRI Tahun 1945 tercantum lembaga-lembaga dalam struktur ketatanegaraan. Terdapat perbedaan antara UUD NRI Tahun 1945 asli dan UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen mengenai lembaga negara. Lembaga negara yang tidak ada dari struktur ketatanegaraan menurut UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen adalah ...

- A DPR
- B MK
- C MPR
- D MA
- E DPA

---

2. Pak Abdul adalah seorang narapidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan untuk menjalani hukuman selama 15 tahun. Karena pengajuan surat kepada Presiden dan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, masa hukuman yang dijalani Pak Abdul berkurang menjadi 7 tahun. Keputusan yang dilakukan Presiden tersebut merupakan hak prerogatif Presiden, yaitu dengan pemberian ..

- A grasi
- B abolisi
- C amnesti

- D remisi
  - E rehabilitasi
- 

3. Ketika seorang menteri menduduki jabatannya, ia tidak dapat dijatuhkan oleh mosi tidak percaya dari parlemen atau DPR. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 pasal .

- A 17 ayat 3
  - B 17 ayat 4
  - C 4 ayat 1
  - D 4 ayat 2
  - E 17 ayat 2
- 

4. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai pelaksanaan kebijakan disebut hak ... ..

- A protokoler
  - B imunitas
  - C angket
  - D interpelasi
  - E berpendapat
- 

5. Tiga lembaga negara yang berwenang untuk mengusulkan hakim mahkamah konstitusi adalah ..

- A DPR, Presiden, dan MA
- B KY, MA, dan DPD
- C DPR, DPD, dan Presiden
- D KY, MA, dan DPD

6. Perhatikan kekuasaan presiden sebagai berikut :

1. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan Darat, Laut, dan Udara
2. Memegang kekuasaan pemerintahan.
3. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU
4. Mengajukan RUU, RAPBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
5. Membuat perjanjian Internasional lainnya dengan persetujuan DPR

- A 2,4, dan 5
- B 2,3, dan 4
- C 1,2, dan 3
- D 1,3, dan 4
- E 1,3, dan 6
- 

7. Perhatikan pernyataan berikut....

1. anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD
  2. MPR adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan.
  3. wewenang mengubah dan menetapkan UUD
  4. memilih Presiden dan Wakil Presiden.
  5. melantik Presiden dan Wakil Presiden
- Hal tersebut di atas yang merupakan pernyataan yang benar mengenai MPR ditunjukkan nomor ...

- A 1,3, dan 4
- B 1,3, dan 5
- C 1,2, dan 3
- D 1,2, dan 4
- E 1,2, dan 5



Daftar Isi

# Kegiatan Pembelajaran II

## 1. TUJUAN

---

Selamat, kalian telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pertama dengan baik. Pada pembelajaran kedua ini kalian akan diberikan pengetahuan tentang lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yang telah diamandemen. Semoga setelah mempelajari modul kegiatan pembelajaran kedua ini kalian bisa mengidentifikasi lembaga-lembaga negara beserta dengan tugas dan kewenangannya yang dimiliki.

" Setitik embun dapat melembabkan daun daunan, sederas hujan dapat membasahi daun beserta dahannya sungguh ilmu yang kamu dapat pada kami bagaikan hujan deras yang tak pernah berhenti membasahi kami. kami tumbuh dan berkembang dan selanjutnya memekari seluruh sekitar kami dan akhirnya membuat mahluk ciptaan Tuhan menjadi bahagia dengan keberadaan kami. Terima kasih telah menjadi hujan deras buat otak dan akhlak kami."

## 2. URAIAN MATERI

---

2.1. Lembaga-Lembaga Negara RI Menurut UUD NRI Tahun 1945:

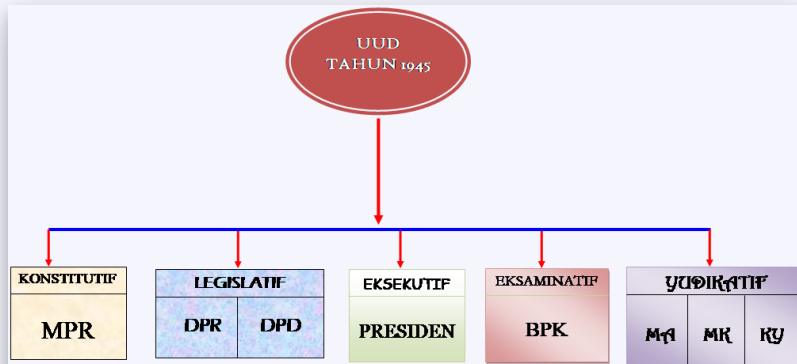
etiap lembaga negara di Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami banyak perubahan (amandemen) saat Indonesia memasuki masa Reformasi yang menggantikan masa Orde Baru yang dikatakan dipenuhi dengan maraknya KKN dan kondisi pemerintahan yang terlalu lama dipegang oleh seorang Presiden yang sama. Perhatikan gambar di bawah ini.

Sistem Ketatanegaraan Sebelum Amandemen UUD NRI Tahun 1945





## Sistem Ketatanegaraan Sesudah Amandemen UUD NRI Tahun 1945



**Gambar :**  
Buku teks PPKn (sumber: ketik disini)

Setelah kalian melihat kedua gambar di atas, tentu kalian sudah bisa membandingkan dan melihat lembaga negara yang masih ada, dihapus dan ditambah sesuai dengan kondisi yang ada.

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan kalian tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, baca dengan baik materi di bawah ini!

### MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

MPR adalah lembaga negara yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. MPR melakukan sidang sedikitnya satu kali dalam lima tahun di ibukota negara. Namun jika diperlukan, MPR dapat bersidang lebih

dari sekali dalam lima tahun dengan mengadakan sidang istimewa.

Dasar Hukum MPR.

1. UUD NRI Tahun 1945 pasal 2 ayat 1 sampai 3.
2. UUD NRI Tahun 1945 pasal 3 ayat 1 sampai 3.
3. UUD NRI Tahun 1945 pasal 37 ayat 1 sampai 5.
4. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Wewenang MPR

1. mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945
2. melantik presiden dan/atau wakil presiden hasil pemilihan umum
3. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah MK memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran
4. melantik wakil presiden menjadi presiden jika presiden mangkat, berhenti,

diberhentikan, dan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya

5. memilih wakil presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh presiden jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatan
6. memilih presiden dan/atau wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, dan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan dari 2 (dua) pasangan calon atas usulan partai politik

#### Hak Anggota MPR

1. mengajukan usul perubahan pasal UUD NRI Tahun 1945
2. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
3. memilih dan dipilih
4. membela diri
5. imunitas
6. protokoler
7. keuangan dan administratif

#### PRESIDEN

Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensiil. Hal tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 4 ayat 1 dan

pasal 17 ayat 1 sampai 4. Pasal 4 ayat 1 disebutkan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan pasal 17 ayat 1 sampai 4 seorang Presiden dibantu oleh menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan setiap menteri membidangi salah satu bidang tertentu dalam pemerintahan. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 (lima) tahun.

Tugas & Wewenang Presiden diatur dalam UUD NRI Tahun 1945:

1. memegang kekuasaan pemerintahan (pasal 4 ayat 1)
2. mengajukan RUU kepada DPR (pasal 5 ayat 1)
3. menetapkan Peraturan Pemerintah (pasal 5 ayat 2)
4. memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU (pasal 10)
5. menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 1)
6. membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 2)
7. menyatakan keadaan bahaya (pasal 12)
8. mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal

13 ayat 1 dan 2)

9. menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR pasal 13 ayat 3)
10. memberi grasi, rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat 1)
11. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14 ayat 2)
12. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (pasal 15)
13. membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (pasal 16)
14. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (pasal 17 ayat 2)
15. membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR, serta mengesahkan RUU (pasal 20 ayat 2 dan 4)
16. menetapkan PERPU dalam kegentingan yang memaksa (pasal 22 ayat 1)
17. mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (pasal 23 ayat 2)
18. meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan

- pertimbangan DPD (pasal 23F ayat 1)
19. menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (pasal 24A ayat 3)
  20. mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (pasal 24B ayat 3)
  21. mengajukan tiga calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi (pasal 24C ayat 3)

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

UU No. 17 Tahun 2014 menyebutkan DPR terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Keanggotaan berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang. Masa jabatan anggota DPR selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR mengucapkan sumpah/janji.

#### Fungsi DPR

1. Fungsi legislasi merupakan perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Fungsi anggaran merupakan fungsi membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap

rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

3. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN

Hak DPR dalam melaksanakan tugas:

1. Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis
2. Hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang penting dan strategis
3. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi dan penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela lainnya, dan atau presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden

Wewenang DPR diatur dalam:

1. membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama
2. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap PERPU yang diajukan oleh presiden untuk menjadi UU
3. membahas rancangan UU yang diajukan oleh presiden atau DPR yang berkaitan dengan otda, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA, dan sumber ekonomi lainnya
4. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan UU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama
5. membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh presiden
6. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan otda, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA, dan sumber ekonomi lainnya



7. memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain
8. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu
9. memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi
10. memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain

#### Tugas DPR

1. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional
2. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan UU
3. menerima RUU yang diajukan oleh DPD berkaitan otda, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA, dan sumber ekonomi lainnya
4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah
5. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan BPK

### DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

DPD merupakan lembaga negara yang anggotanya terdiri dari orang yang dipilih melalui pemilu pada masing-masing provinsi. Anggota DPD setiap provinsi hanya sebanyak 4 (empat) orang. Masa jabatan anggota DPD selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

### Fungsi DPD

1. mengajukan rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber ekonomi lainnya
2. ikut dalam pembahasan rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber ekonomi lainnya
3. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara

dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama

4. mengawasi pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama

Tugas & Wewenang DPD diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 22D ayat 1 sampai 3, yaitu :

1. mengajukan RUU, ikut membahas RUU dan menyusun serta menyampaikan daftar inventaris masalah RUU yang berasal dari DPR atau presiden yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR
2. memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama

3. melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya
4. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN
5. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK

#### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan disahkan oleh Presiden. Jumlah anggota BPK sebanyak 9 orang dan menjabat 1 periode selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dasar hukum BPK:

1. UUD NRI Tahun 1945 pasal 23E ayat 1 sampai 3, pasal 23F ayat 1 dan 2, pasal 23G ayat 1 dan 2
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

#### Tugas BPK

1. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan seluruh lembaga atau instansi atau badan
2. pemeriksaan mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
3. menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPRD sesuai kewenangannya
4. menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur/walikota sesuai dengan kewenangannya

#### Kewenangan BPK

1. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan
2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang atau instansi atau lembaga yang mengelola keuangan
3. menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, lembaga dan/atau badan lain yang mengelola keuangan negara

## MAHKAMAH AGUNG (MA), MAHKAMAH KONSTITUSI (MK), & KOMISI YUDISIAL (KY)

### MAHKAMAH AGUNG

#### Dasar Hukum

1. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 ayat 2
2. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24A ayat 1 s.d. 5
3. UUD NRI Tahun 1945 pasal 25
4. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## Anggota

- Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Jumlah hakim agung paling banyak 60 orang

## Tugas dan Wewenang

1. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
2. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
3. kewenangan lain yang diberikan undang-undang

## MAHKAMAH KONSTITUSI

### Dasar Hukum

1. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 ayat 2
2. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24C ayat 1 s.d. 6
3. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

## Anggota

- Hakim konstitusi diajukan 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden dan ditetapkan oleh Presiden.

## Tugas dan Wewenang

1. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk:
2. menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
3. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
4. memutus pembubaran partai politik
5. memutus tentang hasil pemilu
6. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya

## KOMISI YUDISIAL

### Dasar Hukum

1. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24B ayat 1 s.d. 4
2. UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

### Anggota



- Jumlah anggota KY sebanyak 7 orang yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR

#### Tugas dan Wewenang

1. mengusulkan pengangkatan hakim agung
2. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim
3. menetapkan kode etik atau perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung
4. menjaga & menegakkan pelaksanaan kode etik atau perilaku hakim.

### **3. RANGKUMAN**

---

Sistem ketatanegaraan di Indonesia setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan dengan munculnya lembaga-lembaga negara baru untuk mengakomodir kelemahan atau kekurangan yang terjadi selama masa Orde Baru. Setiap tugas & wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara telah tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara dengan kekuasaan konstitutif anggotanya adalah anggota DPR dan anggota DPD.

DPR, DPD, dan Presiden dipilih melalui pemilihan langsung

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara independen yang bertugas untuk memeriksa lembaga atau badan atau instansi atau orang yang mengelola keuangan negara

MA, MK, dan KY sebagai lembaga negara dengan kekuasaan yudikatif untuk menjalankan fungsi kehakiman di Indonesia

“ Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama ”



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Penilaian Diri II

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban	
01.	Apakah kalian telah memahami sistem ketatanegaraan Indonesia?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
02.	Dapatkah kalian menjelaskan perbedaan sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
03.	Dapatkah kalian menguraikan tugas-tugas Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
04.	Dapatkah kalian membedakan tugas dan wewenang MPR, DPR, dan DPD	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
05.	Dapatkah kalian membedakan tugas dan wewenang MA, MK, dan KY?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak

---

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Latihan Essay I

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif penyelesaiannya!

01. Apa yang dimaksud kelompok penekan.

Alternatif penyelesaian

02. Apa yang dimaksud media komunikasi politik

Alternatif penyelesaian

03. Bentuk partisipasi dan perilaku politik yang dapat diberikan dalam kondisi masyarakat saat ini.

Alternatif penyelesaian



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Latihan Essay III

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokkan dengan alternatif penyelesaiannya!

01. Salah satu ciri-ciri good governance menurut Laode Ida adalah interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Berikan contoh interaksi atau kerja sama yang baik antara pemerintah dengan pihak swasta dalam perwujudan good governance tersebut?

Alternatif penyelesaian

02. Tuliskan deskripsi pemerintah yang baik menurut pendapat kamu!

Alternatif penyelesaian

03. Apa yang terjadi apabila pemerintah hanya menerapkan asas-asas pemerintahan?

Alternatif penyelesaian



Daftar Isi

## Latihan Pilihan Ganda III

1. Perhatikan pernyataan berikut;

1. berhianat kepada negara
2. melakukan tindak pidana
3. melakukan perbuatan tercela
4. melakukan korupsi
5. membuat kebijakan yang memperburuk ekonomi nasional

Berdasar data tersebut, yang bisa menjadi sebab presiden di impeachment adalah nomo :

- A 1,3, dan 5
- B 1,4, dan 5
- C 1,2, dan 3
- D 1,2, dan 4
- E 1,3, dan 4

---

2. Perhatikan pernyataan berikut ...

1. Menko Politik, hukum dan keamanan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Luar Negeri
4. Menteri Pertahanan
5. Menteri Ekonomi

Apabila Presiden dan wakil presiden berhalangan tetap secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan dilakukan oleh .

- A 1,2, dan 3

- B 2,3, dan 4
  - C 1,3, dan 4
  - D 1,4, dan 5
  - E 3,4, dan 5
- 

3. Perhatikan hal berikut
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
  2. Melaksanakan UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan
  3. Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika
  4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan NKRI
- Pernyataan di atas merupakan hal-hal yang berhubungan dengan
- A hak anggota MPR
  - B tugas anggota MPR
  - C kewenangan anggota MPR
  - D peraturan anggota MPR
  - E kewajiban anggota MPR
- 

4. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD 1945 Pasal 11, yaitu ....
- A menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain
  - B mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain



- C mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian
  - D memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
  - E menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun
- 

5. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka ....

- A akuntabilitas publik
  - B public opportunity
  - C detournement de pouvoir
  - D administratif beroep
  - E principle of legal security
- 



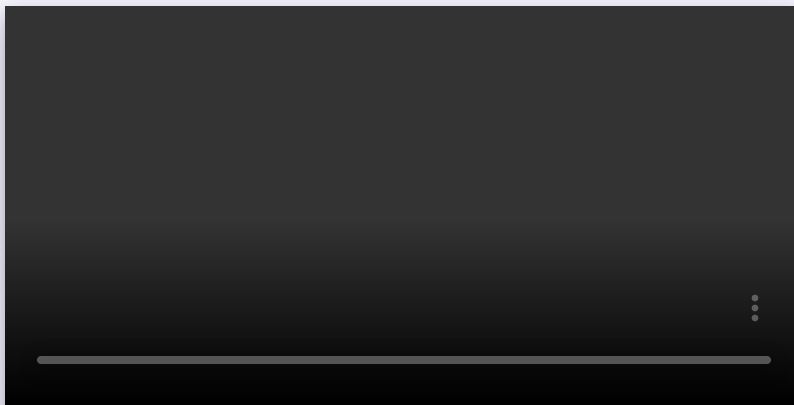
Daftar Isi

# Kegiatan Pembelajaran III

## 1. TUJUAN

---

Tidak terasa kalian sudah berhasil menyelesaikan kegiatan pembelajaran kedua. Tiba saatnya kalian melihat seperti apa tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan mempelajari kegiatan pembelajaran ketiga ini, kalian diharapkan dapat menganalisis tata kelola pemerintahan di Indonesia yang baik. Dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud pelaksanaan nilai-nilai agama serta selalu meningkatkan rasa peduli, tanggung jawab serta jujur dalam diri kalian.



**Video 1:**  
gratifikasi

Nah, setelah kalian mencermati video di atas, maka bacalah dulu uraian materi berikut ini

" Setitik embun dapat melembabkan daun daunan, sederas hujan dapat membasahi daun beserta dahannya sungguh ilmu yang kamu dapat pada kami bagaikan hujan deras yang tak pernah berhenti membasahi kami. kami tumbuh dan berkembang dan selanjutnya memekari seluruh sekitar kami dan akhirnya membuat mahluk ciptaan Tuhan menjadi bahagia dengan keberadaan kami. Terima kasih telah menjadi hujan deras buat otak dan akhlak kami."

### **3. URAIAN MATERI**

---

#### **3.1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**

Good governance telah mulai digalakkan sejak bangsa Indonesia mengalami masa reformasi dimana terjadi perubahan pada sistem ketatanegaraan bangsa ini sejak dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Good governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Menurut Laode Ida, ciri-ciri good governance:

Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi.

Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.

Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi

Keseimbangan kekuatan (balance of force), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama.

Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Menurut United Nations Development Program (UNDP), ada sembilan prinsip good governance, yaitu:

1. partisipasi
2. berorientasi konsensus / kesepakatan
3. memiliki visi strategis

4. tanggap
5. efektif dan efisien
6. akuntabilitas
7. transparansi
8. berkeadilan
9. aturan hukum (rule of law)

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis yaitu unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu, unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik, unsur warga masyarakat (stakeholders).

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 bahwa penyelenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah pemerintahan negara. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih, dan Bebas dari KKN, penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya terkait dengan penyelenggaraan negara.

Menurut UU No. 28 Tahun 1999 ada beberapa asas umum yang harus dipegang dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan negara; asas

kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; dan asas akuntabilitas.

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat.

### **3. RANGKUMAN**

---

Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari uraian materi di atas adalah :

1. Good governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.
2. Tiga unsur dalam pembentukan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintah, unsur swasta, dan masyarakat.

3. Dasar hukum pelaksanaan pemerintahan yang baik adalah UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 28 Tahun 1999
4. Sembilan prinsip good governance menurut UNDP adalah partisipasi, berorientasi konsensus / kesepakatan, memiliki visi strategi, tanggap, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, berkeadilan dan aturan hukum (rule of law)

“ Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama ”



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Penilaian Diri III

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban	
01.	Apakah kalian telah memahami tata kelola pemerintahan yang baik?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
02.	Apakah kalian dapat menyebutkan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
03.	Apakah kalian dapat menyebutkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
04.	Apakah kalian dapat menyebutkan asas-asas penyelenggaraan pemerintaham negara?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak

---

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".



Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Latihan Pilihan Ganda I

1. Di Indonesia suprastruktur politik bertumpu pada trias politica yang terbagi dalam tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagian dari kekuasaan yudikatif di Indonesia adalah ..

- A DPR, MA, dan MK
- B MK, DPD, dan KY
- C KY, KPK, dan KPU
- D KY, KPK, dan MA
- E MA, KY, dan MK

---

2. Infrastruktur politik dapat diartikan sebagai suasana kehidupan politik dalam masyarakat yang memberikan tugas-tugas terhadap lembaga-lembaga negara dalam suasana pemerintahan. Infrastruktur politik yang merupakan gambaran dari proses penyampaian informasi-informasi politik adalah...

- A partai politik
- B kelompok penekan
- C tokoh politik
- D kelompok kepentingan
- E media komunikasi politik

---

3. Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda. Sistem politik yang dianut di negara Indonesia adalah ....

- A monarki
  - B demokrasi Pancasila
  - C liberalisme
  - D komunisme
  - E sosialisme
- 

4. Negara A adalah negara yang telah merdeka. Dalam masyarakat di negara tersebut, terdapat sebuah sistem interaksi yang berkembang. Adapun sistem tersebut membuat masyarakat bersatu dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan sistem politik. Uraian tersebut sejalan dengan pengertian sistem politik yang dikemukakan oleh..

- A Sri Sumantri
  - B David Easton
  - C Sigmund Freud
  - D Rusandi Simuntapura
  - E Gabriel Almond
- 

5. Kelompok penekan dapat mendesak atau memaksa pihak yang berada dalam pemerintahan untuk melakukan gerakan sesuai dengan yang diinginkan atau bahkan berlawanan dari desakannya. Salah satu tujuan dari kelompok penekan adalah..

- A berusaha berperan dan mengambil jabatan yang ada di pemerintahan
- B berusaha untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan

pemerintah

- C berusaha untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah
- D berusaha berperan dan mengambil jabatan yang ada di pemerintahan
- E memperjuangkan suatu kepentingan dan dapat mempengaruhi lembaga-lembaga politik

---

6. Perhatikan data di bawah ini !

- (1). Lembaga Swadaya Masyarakat
- (2). Dewan Perwakilan Rakyat
- (3). Dewan Perwakilan Daerah
- (4). Komisi Pemberantasan Korupsi
- (5). Presiden dan Wakil Presiden
- (6). Mahkamah Konstitusi

Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia adalah...

- A 1, 2, 3 dan 4
- B 1, 3, 4 dan 5
- C 1, 3, 5 dan 6
- D 3, 4, 5 dan 6
- E 2, 3, 5 dan 6

---

7. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah....

- A Mahkamah Agung
  - B Dewan Perwakilan Rakyat
  - C Dewan Perwakilan Daerah
  - D Badan Pengawas Keuangan
  - E Dewan Pertimbangan Agung
- 



Daftar Isi

# Latihan Essay IV

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif penyelesaiannya!

01. Tuliskan ciri-ciri partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti!

Alternatif penyelesaian

02. Sebutkan pengertian partisipasi politik menurut Miriam Budiarjo?

Alternatif penyelesaian

03. Menurut kalian, apa cara yang tepat untuk mengatasi masalah demonstrasi yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Alternatif penyelesaian



Daftar Isi

## Latihan Pilihan Ganda IV

1. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan .

- A Infrastruktur politik
- B Political figures
- C Pressure group
- D Interest group
- E Suprastruktur politik

---

2. Pada dasarnya insfrasruktur politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ...

- A Partai politik
- B Lembaga negara
- C Kelompok kepentingan (interest group)
- D Kelompok penekan (pressure group)
- E Pendapat umum (publik opini) bersama media massa

---

3. .Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan di antaranya terdapat di bawah ini ...

- A sikap mental ditentukan dari atas
- B banyak laporan fiktif/direkayasa
- C tidak menjalin kerjasama dengan negara lain
- D terjadi krisis moral, krisis akhlak, dan krisis ekonomi

- E hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
- 

4. Otonomi daerah pada masa Orde Baru belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Hal ini karena asas desentralisasi masih berada di bawah bayang-bayang ....

- A Efisiensi
  - B Sentralisasi
  - C Dekonsentrasi
  - D Otonomi daerah
  - E Tugas pembantuan
- 

5. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan DIY meliputi ....

- A Berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia  
Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur
- B Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- C bagi pemeluknya dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama
- E Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas





Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Kegiatan Pembelajaran IV

## 1. TUJUAN

---

Tibalah kita pada kegiatan pembelajaran terakhir yaitu pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat ini membahas tentang partisipasi politik setiap warga negara dalam sistem politik di Indonesia dan diharapkan kalian bisa menunjukkan apa saja bentuk-bentuk partisipasi politik warga negara tersebut.

" Setitik embun dapat melembabkan daun daunan, sederas hujan dapat membasahi daun beserta dahannya sungguh ilmu yang kamu dapat pada kami bagaikan hujan deras yang tak pernah berhenti membasahi kami. kami tumbuh dan berkembang dan selanjutnya memekari seluruh sekitar kami dan akhirnya membuat mahluk ciptaan Tuhan menjadi bahagia dengan keberadaan kami. Terima kasih telah menjadi hujan deras buat otak dan akhlak kami."

## 4. URAIAN MATERI

---

### 4.1. Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Politik di Indonesia

Partisipasi politik merupakan bagian dari sebuah budaya politik karena dengan adanya partisipasi ini

merupakan salah satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik.

1. Miriam Budiarjo menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan politik (public policy)
2. Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum serta menentukan pemimpin pemerintahan.

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan orang atau sekelompok orang sebagai warga negara dalam kegiatan politik dengan tujuan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

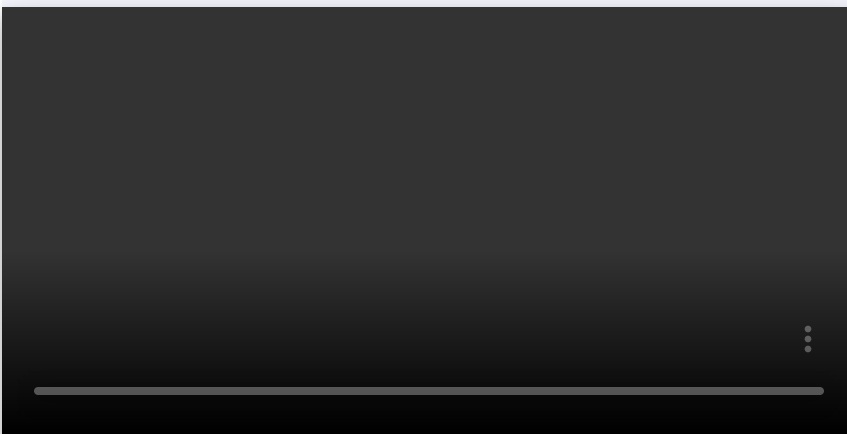
ppp

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan orang atau sekelompok orang sebagai warga negara dalam kegiatan politik dengan tujuan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Ciri-ciri partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti:

1. kegiatan individu warga negara biasa yang dapat diamati,
2. kegiatan yang dilakukan atau diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat atau pelaksana keputusan politik
3. dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung
4. memengaruhi pemerintah dilakukan melalui prosedur wajar dan tidak berupa kekerasan
5. kegiatan yang berhasil ataupun yang tidak memengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik

Simak video di bawah ini!



**Video 1:**  
y2mate.com -  
tata\_cara\_mencoblos\_pada\_pemilu\_2019\_IHSUrdCN  
BKM\_360p

Bagaimana? Sudah faham tata cara dalam memberikan suara pada pemilu 2019? Jika masih

belum faham silakan diulang kembali memutar video tersebut sampai kalian betul-betul faham alur dalam pemilu

Apakah hanya pemilu saja bentuk partisipasi politik? Tentu saja tidak.

Menurut Gabriel Almond, bentuk-bentuk partisipasi politik terbagi dua yaitu

1. konvensional
2. Non konvensional

Tujuan dari partisipasi politik adalah memberikan kesempatan kepada rakyat atau warga negara untuk mempengaruhi proses kebijakan, alat mengontrol dari rakyat atau warga negara, membantu meringankan beban pemerintah, dan melegimitasi rezim dan kebijakan rezim.

Berikut ini adalah contoh partisipasi politik:

1. Pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua ekstra kurikuler
2. Pemilihan ketua RT atau RW
3. Pemilu legislatif dan presiden atau pemilihan kepala daerah
4. Pembuatan AD ART OSIS atau ekstra kurikuler
5. Diskusi di lingkungan sekolah, masyarakat, atau lembaga-lembaga negara serta antarlembaga

negara

6. Aksi demonstrasi yang damai, sopan dan santun

### 3. RANGKUMAN

Dari uraian di atas kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Partisipasi politik merupakan kegiatan orang atau sekelompok orang sebagai warga negara dalam kegiatan politik dengan tujuan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.
2. Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond ada dua yaitu konvensional dan non konvensional.
3. Tujuan dari partisipasi politik adalah memberikan kesempatan kepada rakyat atau warga negara untuk mempengaruhi proses kebijakan, alat mengontrol dari rakyat atau warga negara, membantu meringankan beban pemerintah, dan melegimitasi rezim dan kebijakan rezim.

“ Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama ”



Daftar Isi

e-Modul 2018  
Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Penilaian Diri IV

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban	
01.	Apakah kalian telah memahami partisipasi politik?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
02.	Apakah kalian dapat menunjukkan partisipasi politik warga negara dalam kehidupan bernegara?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
03.	Apakah kalian dapat memberikan contoh-contoh partisipasi politik dalam di sekolah?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.



Daftar Isi



e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Penilaian Diri I

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban	
01.	Apakah kalian telah memahami sistem politik Indonesia?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
02.	Dapatkah kalian menyebutkan komponen dari suprastruktur politik Indonesia ?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
03.	Dapatkah kalian menyebutkan komponen dari infrastruktur politik Indonesia?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak

---

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Evaluasi

## Soal 1.

Di Indonesia suprastruktur politik bertumpu pada trias politica yang terbagi dalam tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagian dari kekuasaan yudikatif di Indonesia adalah

- A. DPR, MA, dan MK
- B. MK, DPD, dan KY
- C. KY, KPK, dan KPU
- D. KY, KPK, dan MA
- E. MA, KY, dan MK

## Soal 2.

Infrastruktur politik dapat diartikan sebagai suasana kehidupan politik dalam masyarakat yang memberikan tugas-tugas terhadap lembaga-lembaga negara dalam suasana pemerintahan. Infrastruktur politik yang merupakan gambaran dari proses penyampaian informasi-informasi politik adalah ....

- A. partai politik
- B. kelompok penekan
- C. tokoh politik
- D. kelompok kepentingan
- E. media komunikasi politik

### Soal 3.

Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda. Sistem politik yang dianut di negara Indonesia adalah..

- A. demokrasi Pancasila
- B. monarki
- C. liberalisme
- D. komunisme
- E. sosialisme

### Soal 4.

Negara A adalah negara yang telah merdeka. Dalam masyarakat di negara tersebut, terdapat sebuah sistem interaksi yang berkembang. Adapun sistem tersebut membuat masyarakat bersatu dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan sistem politik. Uraian tersebut sejalan dengan pengertian sistem politik yang dikemukakan oleh ....

- A. Sri Sumantri
- B. David Easton
- C. Sigmund Freud
- D. Gabriel Almond
- E. Rusandi Simuntapura

### Soal 5.

Kelompok penekan dapat mendesak atau memaksa pihak yang berada dalam pemerintahan untuk melakukan gerakan sesuai dengan yang diinginkan atau bahkan berlawanan dari desakannya. Salah satu tujuan dari kelompok penekan adalah ....

- A. memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional
- B. mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
- C. memperjuangkan suatu kepentingan dan dapat mempengaruhi lembaga-lembaga politik
- D. berusaha untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah
- E. berusaha berperan dan mengambil jabatan yang ada di pemerintahan

### Soal 6.

Di dalam UUD NRI Tahun 1945 tercantum lembaga-lembaga dalam struktur ketatanegaraan. Terdapat

perbedaan antara UUD NRI Tahun 1945 asli dan UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen mengenai lembaga negara. Lembaga negara yang tidak ada dari struktur ketatanegaraan menurut UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen adalah ....

- A. DPA
- B. MA
- C. MPR
- D. MK
- E. DPR

### Soal 7.

Pak Abdul adalah seorang narapidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan untuk menjalani hukuman selama 15 tahun. Karena pengajuan surat kepada Presiden dan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, masa hukuman yang dijalani Pak Abdul berkurang menjadi 7 tahun. Keputusan yang dilakukan Presiden tersebut merupakan hak prerogatif Presiden, yaitu dengan pemberian....

- A. abolisi
- B. grasi
- C. amnesti
- D. remisi

- E. rehabilitasi

### Soal 8.

Ketika seorang menteri menduduki jabatannya, ia tidak dapat dijatuhkan oleh mosi tidak percaya dari parlemen atau DPR. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 pasal . ....

- A. 4 ayat 1
- B. 4 ayat 2
- C. 17 ayat 2
- D. 17 ayat 3
- E. 17 ayat 4

### Soal 9.

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai pelaksanaan kebijakan disebut hak ....

- A. protokoler
- B. imunitas
- C. angket
- D. interpelasi
- E. berpendapat



### Soal 10.

Tiga lembaga negara yang berwenang untuk mengusulkan hakim mahkamah konstitusi adalah....

- A. DPR, KY, dan MA
- B. DPD, MA, dan Presiden
- C. DPR, DPD, dan Presiden
- D. KY, MA, dan DPD
- E. DPR, Presiden, dan MA

✓ Hasil Evaluasi

Nilai	Deskripsi

🏠 Daftar Isi